



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERUBAHAN TARGET BAURAN ENERGI BARU TERBARUKAN INDONESIA

Dewi Wuryandani
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menurunkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional pada 2025, dari 23 persen menjadi antara 17–20 persen. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan perubahan target tersebut menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Penurunan target ini disebabkan capaian tahun lalu yang berada di bawah ekspektasi.

Target puncak penurunan emisi karbon juga mundur lima tahun, sejalan dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Awalnya, pemerintah menargetkan puncak emisi karbon terjadi pada 2030, sehingga *Net Zero Emission* (NZE) akan tercapai di 2060. Pada awalnya, *Just Energy Transition Partnership* (JETP) Indonesia menargetkan puncak emisi CO₂ sektor energi pada tahun 2030, kini mundur di tahun 2035. Hal ini untuk mengakomodir rencana pemerintah, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dapat tercapai sebesar 8 persen pada tahun 2028–2029, dan investasi untuk meningkatkan bauran EBT akan meningkat.

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi di sektor EBT akan meningkat dari 50,4 persen menjadi 56 persen hingga 2040. Hal ini mengingat adanya pasokan gas alam yang banyak ditemukan di Aceh, Bali, hingga Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian ESDM untuk meningkatkan target bauran EBT dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Hilirisasi tersebut bertujuan selain untuk memberikan nilai tambah, juga sebagai bagian yang paling penting dari sisi transisi energi.

Dalam RPP KEN, target bauran EBT 23 persen dapat dicapai pada 2030 dan hingga 2045 ditargetkan proporsinya sebesar 46 persen. Menurut Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, realisasi bauran EBT tahun lalu yang seharusnya mencapai 19,5 persen hanya tercapai 14,68 persen. Oleh karena itu, dalam satu tahun ke depan, pemerintah akan berupaya mendorong kenaikan bauran EBT yang signifikan agar target KEN tercapai.

Kondisi kapasitas terpasang EBT tahun lalu yang mencapai 14,68 persen mendapatkan tambahan instalasi sebanyak 1,2 *gigawatt* (GW) pada tahun 2023–2024, sehingga kapasitas terpasang sebesar 14,8 GW atau 14.883 *megawatt* (MW). Kapasitas terpasang tersebut terdiri atas pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga *micro hydro* (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan pembangkit listrik tenaga bio, dengan total 1,2 GW. Target pada tahun 2025 diasumsikan ada penambahan sekitar 1,2 GW, sehingga bisa mencapai 16 GW kapasitas terpasang, dan diharapkan hingga tahun 2060 proporsi bauran EBT terhadap energi nasional dapat mencapai

72 persen di sektor ketenagalistrikan. Kementerian ESDM menargetkan selama 5 tahun ke depan terdapat proyeksi penambahan kapasitas listrik yang diharapkan sekitar 180 GW berasal dari EBT dan terdapat energi baru di Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong tercapainya dua hal dalam penyediaan energi di Indonesia. *Pertama*, mendorong tercapainya ketersediaan energi yang semakin kompetitif baik dari sisi kualitas listrik maupun dari sisi harga; *Kedua*, menurunkan tingkat emisi karbon.

Atensi DPR

Target awal bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025 mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap RPP KEN. Terlebih, pada tahun 2024, capaian EBT dalam bauran energi nasional hanya sebesar 14,68 persen dari target sebesar 19,5 persen. Oleh karena itu, dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memastikan pemerintah tetap berkomitmen pada target pengurangan emisi karbon dan target bauran EBT agar NZE pada tahun 2060 dapat tercapai. Selain itu, Komisi XII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat laju perkembangan EBT dan meningkatkan investasi EBT. Dalam rangka fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu mendorong penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) untuk mendorong transisi energi di Indonesia.

Sumber

Bisnis Indonesia, 21 Februari 2025;
katadata.co.id, 21 Februari 2025; dan
kompas.com, 22 Februari 2025.

Minggu ke-3 Februari
(17 s.d. 23 Februari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making